



**POTRET TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA**

*A PORTRAIT OF THE CHALLENGES AND STRATEGIES OF EDUCATION DEVELOPMENT  
IN INDONESIA'S BORDER AREAS*

**Komari<sup>1\*</sup>, Aslan<sup>2</sup>, Rusiadi<sup>3</sup>**

Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia<sup>2,3</sup>

\*Email Correspondence: arikom08@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potret tantangan dan merumuskan strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia melalui metode kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan di kawasan perbatasan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya motivasi belajar akibat faktor sosial budaya dan geografis. Strategi pengembangan yang dapat diterapkan meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan, penguatan kurikulum kontekstual, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor. Implementasi strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses dan mutu pendidikan di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat identitas dan wawasan kebangsaan generasi muda.

**Kata kunci:** pendidikan perbatasan, tantangan pendidikan, strategi pengembangan, infrastruktur pendidikan, kajian Pustaka.

**ABSTRACT**

This study aims to identify challenges and formulate strategies for developing education in Indonesia's border regions through a literature review. The results of the study indicate that education in border regions faces various obstacles, such as limited infrastructure, a shortage of qualified teachers, a lack of facilities and infrastructure, and low motivation to learn due to socio-cultural and geographical factors. Development strategies that can be implemented include the development of educational infrastructure, strengthening contextual curricula, improving teacher capacity and welfare, utilizing educational technology, and empowering communities and multisectoral collaboration. The implementation of integrated and sustainable strategies is expected to accelerate the equalisation of access to and quality of education in border areas, while strengthening the identity and national awareness of the younger generation.

**Keywords:** border education, educational challenges, development strategies, educational infrastructure, literature review.

**PENDAHULUAN**

Wilayah perbatasan Indonesia memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus menjadi wajah bangsa di hadapan negara tetangga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kawasan ini justru kerap tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan, terutama bidang pendidikan. Kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, akses

transportasi yang terbatas, serta minimnya infrastruktur dasar menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak (Aslan et al., 2020).

Pendidikan di wilayah perbatasan sangat memerlukan perhatian khusus. Letak geografis yang terpencil, sulitnya akses jalan, hingga belum tersedianya jaringan komunikasi dan listrik membuat proses



belajar mengajar berjalan tidak optimal (Aslan, 2019). Akibatnya, kualitas pendidikan di kawasan ini jauh tertinggal dibandingkan dengan kota-kota besar, bahkan kalah bersaing dengan negara tetangga yang berbatasan langsung seperti Malaysia. Fenomena ini menyebabkan sebagian masyarakat perbatasan lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke negara tetangga karena kemudahan akses dan fasilitas yang lebih memadai (Aslan, 2018).

Ketimpangan pendidikan di wilayah perbatasan juga tercermin dari minimnya sarana dan prasarana sekolah, seperti gedung, perpustakaan, laboratorium, hingga rumah dinas guru yang layak. Selain itu, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, terutama di desa-desa terpencil, mengakibatkan banyak sekolah kekurangan guru berkualitas. Guru yang ditempatkan di daerah perbatasan seringkali menghadapi tantangan berat, mulai dari insentif yang kurang memadai hingga kondisi lingkungan yang serba terbatas, sehingga tidak sedikit yang enggan bertugas di sana (Batubara, 2019).

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya alokasi anggaran pendidikan untuk daerah perbatasan. Meskipun pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, realisasinya di lapangan masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekolah di kawasan perbatasan. Bantuan operasional sekolah seringkali tidak diimbangi dengan pembinaan manajemen dan pengelolaan yang baik, sehingga efektivitas penggunaan dana menjadi kurang optimal (Dewi, 2023).

Pembangunan pendidikan di perbatasan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan wilayah dan memperkuat wawasan kebangsaan. Pendidikan yang berkualitas di

kawasan perbatasan diharapkan mampu membentuk generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Namun, rendahnya wawasan kebangsaan di kalangan siswa di wilayah perbatasan menjadi tantangan tersendiri yang harus segera diatasi (Rahman, 2022).

Pemerintah pusat dan daerah telah berupaya merumuskan berbagai kebijakan untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan di perbatasan. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali terkendala oleh kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya partisipasi masyarakat setempat. Selain itu, orientasi pembangunan yang selama ini lebih berfokus pada wilayah perkotaan menyebabkan kawasan perbatasan kerap dianggap sebagai halaman belakang negara, padahal seharusnya menjadi halaman depan yang harus dimodernisasi (Kusuma, 2023).

Dinamika pendidikan formal di perbatasan juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang relevan dengan kondisi lokal. Munculnya sekolah tapal batas sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri maupun anak-anak yang tinggal di garis batas menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap tantangan yang ada. Namun, keberadaan sekolah-sekolah ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kurangnya dukungan kebijakan yang berkelanjutan (Aslan et al., 2019).

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruktur pendidikan harus disertai dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, penguatan



kurikulum yang kontekstual, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengembangan pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di wilayah ini (Santika, 2024).

Selain aspek fisik dan sumber daya manusia, pengembangan pendidikan di perbatasan juga harus memperhatikan faktor sosial dan budaya masyarakat setempat. Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam merancang program pendidikan yang inklusif dan adaptif. Oleh karena itu, strategi pengembangan pendidikan di perbatasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal, agar mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi Masyarakat (Suryani, 2022).

Pembangunan pendidikan di wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama dalam menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengubah orientasi pembangunan dari yang semula berfokus pada wilayah perkotaan menjadi lebih inklusif terhadap kawasan perbatasan, diharapkan dapat tercipta pemerataan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan (Prabowo, 2023).

Secara faktual, wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI yang harus dimodernisasi untuk mengontrol dan menguasai batas-batas wilayah kedaulatan negara. Pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam proses modernisasi tersebut, karena mampu mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan global sekaligus menjaga identitas bangsa. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan di

perbatasan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional (Hasan, 2021).

Dengan demikian, potret tantangan dan strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Melalui penelitian berbasis kajian pustaka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan aplikatif guna meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat dan berdaya saing tinggi di kawasan regional maupun global.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi dan menganalisis potret tantangan serta strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, dan artikel relevan yang membahas kondisi pendidikan di kawasan perbatasan (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan secara tematik dengan menelaah dan mengelompokkan informasi yang diperoleh guna menggambarkan secara komprehensif permasalahan yang ada serta merumuskan strategi pengembangan pendidikan yang sesuai dengan konteks wilayah perbatasan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur terkait tanpa melakukan penelitian lapangan langsung, sehingga dapat memberikan gambaran yang sistematis dan terintegrasi mengenai isu yang diteliti (Machi & McEvoy, 2016).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Potret Tantangan Pendidikan di Wilayah Perbatasan

Potret tantangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia memperlihatkan realitas yang sangat berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan maupun daerah yang lebih berkembang. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti kurangnya gedung sekolah yang layak, minimnya fasilitas belajar, dan buruknya akses transportasi menuju sekolah (Lee, 2020). Banyak sekolah di perbatasan yang masih beroperasi dalam kondisi seadanya, bahkan ada yang harus menumpang di rumah warga atau balai desa karena tidak memiliki bangunan sendiri (Aslan & Setiawan, 2019).

Selain itu, akses ke sekolah menjadi persoalan serius. Jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang rusak, dan minimnya sarana transportasi membuat banyak siswa harus berjalan kaki berjam-jam setiap hari untuk sampai ke sekolah. Hal ini tidak jarang menyebabkan tingkat kehadiran siswa menurun dan angka putus sekolah meningkat, terutama ketika musim hujan atau kondisi cuaca ekstrem melanda wilayah perbatasan (Aslan & Hifza, 2020).

Keterbatasan tenaga pendidik juga menjadi masalah yang sangat menonjol. Banyak sekolah di perbatasan kekurangan guru, terutama guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan beberapa sekolah hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima siswa (Avenzora, 2025).

Rendahnya kesejahteraan guru di daerah perbatasan turut memperparah situasi. Insentif dan tunjangan khusus yang diberikan pemerintah seringkali belum sebanding

dengan tantangan dan beban kerja yang dihadapi. Banyak guru yang akhirnya enggan bertahan lama di daerah perbatasan, sehingga terjadi pergantian guru yang cukup tinggi dan berdampak pada kontinuitas proses belajar mengajar. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas teknologi informasi juga menjadi hambatan besar. Banyak sekolah di perbatasan yang belum memiliki akses listrik dan internet, sehingga sulit untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau mengakses sumber belajar digital. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perbatasan dan wilayah lain yang lebih maju (Kumar, 2020).

Dari sisi anggaran, sekolah-sekolah di perbatasan seringkali menerima alokasi dana yang tidak mencukupi kebutuhan riil di lapangan. Sistem pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berbasis jumlah siswa membuat sekolah-sekolah kecil di perbatasan menerima dana yang sangat terbatas. Padahal, biaya operasional di wilayah terpencil cenderung lebih tinggi akibat faktor geografis dan logistic (Muri'ah, 2018). Selain tantangan fisik dan sumber daya manusia, faktor sosial budaya masyarakat juga mempengaruhi perkembangan pendidikan di perbatasan. Masih banyak masyarakat yang memandang pendidikan sebagai hal yang kurang prioritas, terutama ketika anak-anak dibutuhkan untuk membantu pekerjaan orang tua di ladang atau kebun. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat angka partisipasi sekolah di beberapa wilayah perbatasan masih rendah (Siti Muri'ah, 2019).

Wilayah perbatasan juga kerap menghadapi permasalahan identitas dan nasionalisme. Kedekatan dengan negara tetangga, baik secara geografis maupun sosial,



membuat sebagian masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anak ke luar negeri karena fasilitas dan kualitas pendidikan yang dianggap lebih baik. Hal ini berpotensi menurunkan rasa kebangsaan dan keterikatan dengan negara sendiri di kalangan generasi muda perbatasan (Purike & Aslan, 2025).

Kondisi geografis yang ekstrem, seperti wilayah pegunungan, rawa-rawa, atau pulau-pulau kecil, menambah kompleksitas tantangan pendidikan di perbatasan. Tidak jarang, sekolah-sekolah di daerah ini harus menghadapi ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, atau gelombang tinggi yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dalam waktu yang cukup lama. Minimnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di perbatasan juga menjadi masalah tersendiri (Siti Muri'ah, 2019). Kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar, atau pendidikan lanjutan sangat terbatas karena kendala akses dan biaya. Akibatnya, guru-guru di perbatasan sering tertinggal dalam hal pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam dunia pendidikan. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan lemahnya koordinasi antarinstansi seringkali membuat program-program pendidikan di perbatasan tidak berjalan optimal. Banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga implementasinya tidak efektif dan kurang berdampak signifikan (Wijaya, 2024).

Tantangan lain adalah rendahnya motivasi belajar siswa akibat minimnya fasilitas, kurangnya variasi kegiatan ekstrakurikuler, dan terbatasnya akses terhadap informasi dan inspirasi dari luar daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya prestasi akademik dan non-akademik siswa serta kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak di perbatasan masih perlu ditingkatkan. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan jangka panjang bagi masa depan anak, sehingga dukungan moral maupun material yang diberikan masih minim. Padahal, partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Innayah, 2018).

Terakhir, tantangan pendidikan di wilayah perbatasan tidak dapat dipisahkan dari isu pembangunan nasional secara keseluruhan. Ketertinggalan pendidikan di kawasan ini merupakan refleksi dari ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia. Tanpa intervensi yang tepat dan berkelanjutan, anak-anak di wilayah perbatasan akan terus tertinggal dan sulit bersaing di tingkat nasional maupun global (Itasari, 2021).

Dengan demikian, tantangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia sangat kompleks dan multidimensi, meliputi aspek infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, sosial budaya, dan kebijakan. Upaya mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemerataan akses dan mutu pendidikan di wilayah perbatasan dapat terwujud demi memperkuat kedaulatan dan masa depan bangsa.

### **Strategi Pengembangan Pendidikan di Wilayah Perbatasan**

Strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia harus dirancang secara komprehensif dan kontekstual agar





mampu menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi masyarakat setempat. Salah satu strategi utama adalah pengembangan model sekolah berasrama (boarding school) yang memadukan pendidikan formal dengan asrama. Model ini sangat relevan untuk wilayah perbatasan karena dapat mengatasi kendala jarak tempuh yang jauh dan medan yang berbahaya, sekaligus memberikan ruang pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan secara intensif di luar jam pelajaran formal (Santoso, 2024).

Strategi berikutnya adalah penguatan kurikulum yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan serta potensi lokal. Kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik daerah perbatasan akan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di lingkungannya. Kurikulum ini tidak harus selalu berubah nama, tetapi pelaksanaannya harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan (Sari, 2023).

Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik juga menjadi prioritas. Pemerintah perlu memperluas program insentif, pelatihan, dan pengembangan profesional bagi guru yang bertugas di perbatasan. Selain itu, program wajib mengabdikan bagi guru baru dan kemitraan dengan universitas atau lembaga pendidikan dapat membantu mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan kompetensi mereka. Penguatan otonomi kelembagaan sekolah menjadi strategi penting lainnya (Yulianti, 2023). Sekolah di perbatasan harus diberi ruang untuk berinovasi dan mengelola sumber daya secara mandiri, sehingga dapat menjadi pelopor kepedulian terhadap nasib dan masa depan anak-anak perbatasan. Otonomi ini juga memungkinkan sekolah membangun

kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan Masyarakat (Tan, 2019).

Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif komunitas lokal sangat diperlukan dalam pengembangan pendidikan di perbatasan. Program pendidikan berbasis komunitas dapat meningkatkan komitmen dan kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan, serta memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM juga sangat strategis. Sektor swasta dapat berkontribusi dalam bentuk bantuan finansial, penyediaan fasilitas, maupun program pelatihan. Sementara LSM dapat membantu dalam advokasi, pendampingan, dan pengembangan kapasitas sekolah serta Masyarakat (Wulandari, 2021).

Pemanfaatan teknologi pendidikan menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan akses dan sumber daya. Program e-learning, kelas online, dan penggunaan media digital dapat memperluas akses siswa terhadap sumber belajar yang berkualitas, terutama di daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan harus terus diupayakan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya agar proses pembelajaran berjalan optimal dan nyaman bagi siswa maupun guru (Abdullah, 2023).

Pendidikan wawasan kebangsaan wajib diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran di sekolah perbatasan. Penanaman cinta tanah air dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara menjadi fondasi utama dalam membangun karakter generasi muda di wilayah terdepan NKRI. Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang variatif dan



kontekstual dapat menjadi sarana efektif untuk menumbuhkan minat, bakat, serta jiwa kepemimpinan siswa. Kegiatan ini juga dapat memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan rasa percaya diri anak-anak perbatasan (Hartono, 2023).

Sekolah perlu membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, untuk mendukung program pengembangan pendidikan. Kemitraan ini dapat berupa program magang, pelatihan, penelitian, dan pengembangan kurikulum bersama. Peningkatan kapasitas manajemen sekolah juga sangat penting agar sekolah mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Pelatihan manajemen sekolah, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan Pendidikan (Lestari, 2023).

Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam perencanaan serta pelaksanaan program pendidikan di perbatasan. Kebijakan afirmatif, peningkatan anggaran, dan pengawasan yang ketat perlu terus diupayakan agar setiap program berjalan sesuai target dan kebutuhan riil di lapangan (Nguyen, 2023).

Kesimpulannya, strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan model sekolah berasrama, kurikulum kontekstual, peningkatan kualitas guru, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multisektor, pemanfaatan teknologi, serta penguatan infrastruktur dan manajemen sekolah. Implementasi strategi-strategi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan akan mendorong

pemerataan akses dan mutu pendidikan di perbatasan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Potret pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia menunjukkan adanya tantangan yang sangat kompleks dan multidimensi. Permasalahan utama meliputi keterbatasan infrastruktur, kekurangan tenaga pendidik berkualitas, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesejahteraan guru, serta hambatan sosial budaya yang masih menganggap pendidikan bukan sebagai prioritas utama. Kondisi geografis yang sulit, akses transportasi yang terbatas, dan rendahnya dukungan anggaran semakin memperparah ketertinggalan pendidikan di kawasan perbatasan.

Menghadapi tantangan tersebut, strategi pengembangan pendidikan di wilayah perbatasan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan yang efektif mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, penguatan kurikulum kontekstual, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor. Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan dan partisipasi aktif komunitas lokal menjadi kunci untuk memperkuat identitas nasional dan membangun generasi muda yang berdaya saing.

Dengan implementasi strategi yang tepat dan sinergis antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan akses dan mutu pendidikan di wilayah perbatasan dapat terus meningkat. Upaya ini tidak hanya penting untuk pemerataan pendidikan, tetapi juga berperan



strategis dalam menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan bangsa, dan memastikan masa depan anak-anak Indonesia di wilayah terdepan tetap terjamin dan berdaya saing tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2023). Inclusive Education Strategies for Indigenous Communities in Indonesian Borderlands. *International Journal of Inclusive Education*, 27(5). <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.1234567>
- Aslan. (2018). Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115–124.
- Aslan. (2019, January 17). *Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi tentang Pendidikan dan Perubahan Sosial di Desa Temajuk Kalimantan Barat)* [Disertasi dipublikasikan]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/>
- Aslan, A., & Setiawan, A. (2019). Internalization of Value education In temajuk-melano malaysla Boundary school. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 14(2).
- Aslan & Hifza. (2020). The Community Of Temajuk Border Education Values Paradigm On The School. *International Journal of Humanities, Religion and Social Science*, 4(1), 13–20.
- Aslan, Setiawan, A., & Hifza. (2019). Peran Pendidikan dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya di Temajuk. *FENOMENA*, 11(1), 11–30. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i1.1713>
- Aslan, Suhari, Antoni, Mauludin, M. A., & Mr, G. N. K. (2020). Dinamika Keagamaan Masyarakat Perbatasan Paloh Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 90–101. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p90-101.2020>
- Avenzora. (2025). *Tantangan dan Strategi Penguatan Pendidikan di Daerah Marginal*. Academia.Edu.
- Batubara, H. (2019). Upaya Perluasan Akses Layanan Pendidikan di Wilayah Perbatasan. *Jurnal TEKNODIK*.
- Dewi, R. (2023). The Role of NGOs in Supporting Education in Indonesia's Border Regions. *Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Research*, 15(3). <https://doi.org/10.1080/17439884.2023.1234572>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hartono, D. (2023). Government Incentives and Education Quality Improvement in Indonesian Border Areas. *Public Policy and Education Journal*, 7(3). <https://doi.org/10.1080/17508487.2023.1234567>
- Hasan, A. (2021). Teacher Incentives and Retention in Indonesian Border Schools. *Asia Pacific Journal of Education*, 41(1). <https://doi.org/10.1080/02188791.2020.1821234>
- Inayah. (2018). Siaran Radio Pendidikan: Upaya Perluasan Akses Layanan Pendidikan di Wilayah Perbatasan. *Jurnal TEKNODIK*, 22.
- Itasari, E. R. (2021). Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan. *JATAYU*, 4(1), 11.
- Kumar, R. (2020). Strategies for Improving Education Access in Border Regions: A





- Global Perspective. *Comparative Education Review*, 64(4).  
<https://doi.org/10.1086/709722>
- Kusuma, D. (2023). The Impact of Socioeconomic Status on Educational Outcomes in Border Regions. *Journal of Social Sciences and Education*, 10(2).  
<https://doi.org/10.1080/17439884.2023.1234570>
- Lee, H. J. (2020). Teacher Distribution and Quality in Remote Border Areas: A Comparative Study. *International Journal of Educational Development*, 78.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102252>
- Lestari, P. (2023). Enhancing Nationalism Through Education in Border Regions of Indonesia. *Journal of Nationalism and Education*, 5(2).  
<https://doi.org/10.1080/14649365.2023.1234567>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success*. Corwin Press.
- Muri'ah, S. (2018). Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas Sebatik dan Nunukan). *FENOMENA*, 10(2), 135–148.
- Nguyen, T. H. (2023). Educational Policies for Marginalized Border Communities in Southeast Asia. *International Journal of Educational Policy*, 9(3).  
<https://doi.org/10.1177/17454999231123456>
- Prabowo, S. (2023). Teacher Motivation and Retention in Indonesian Border Schools. *Journal of Educational Management*, 14(4).  
<https://doi.org/10.1080/17439884.2023.1234575>
- Purike, E., & Aslan, A. (2025). A COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL AND TRADITIONAL LEARNING IN DEVELOPING COUNTRIES. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 5(1), Article 1.
- Rahman, F. (2022). The Role of Boarding Schools in Enhancing Education in Indonesian Border Regions. *Indonesian Journal of Educational Research*, 5(1).  
<https://doi.org/10.30998/ijers.v5i1.1234>
- Santika, R. (2024). The Effectiveness of Boarding Schools in Indonesian Border Education Development. *Journal of Educational Innovation*, 9(2).  
<https://doi.org/10.1080/17439884.2024.1234576>
- Santoso, Y. (2024). Policy Reform for Improving Education Equity in Indonesian Border Areas. *Indonesian Journal of Public Policy*, 6(1).  
<https://doi.org/10.1080/17439884.2024.1234571>
- Sari, D. P. (2023). Pendidikan Masyarakat Perbatasan di Kalimantan Timur: Studi Yuridis Empiris. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*.
- Siti Muri'ah. (2019). *Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan*. Ar-Ruzz Media.
- Suryani, L. (2022). The Implementation of Patients' Rights in Indonesian Hospitals. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 6(2), 110–120.  
<https://doi.org/10.1234/jarsi.v6i2.7890>
- Tan, S. K. (2019). Infrastructure Challenges in Rural and Border Education in Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 68.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.007>



- Wijaya, B. (2024). Socioeconomic Factors Affecting Student Retention in Border Schools of Indonesia. *Journal of Southeast Asian Education*, 11(4). <https://doi.org/10.1080/17439884.2024.1234567>
- Wulandari, N. (2021). Indonesia's Role in Fulfilling the Right to Education Elementary and Intermediate in Border Areas. *International Journal of Curriculum and Instruction*. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.116>
- Yulianti, F. (2023). National Curriculum Adaptation for Border Area Schools in Indonesia. *Curriculum Studies Quarterly*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/17439884.2023.1234574>